

### **BAB III**

## **LATAR BELAKANG TERJADINYA PERLAWANAN PETANI DI GEDANGAN 1904**

#### **A. Profil Daerah Dan Faktor Ekologis**

Sidoarjo merupakan suatu daerah yang terletak di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Surabaya dan Sungai Porong yang merupakan cabang dari Sungai Brantas. Batas sebelah Utara adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah Timur adalah Selat Madura dan sebelah Barat adalah Kabupaten Mojokerto. Pada masa kolonial atau Hindia Belanda, Sidoarjo dikenal dengan nama Sidokare yang merupakan daerah bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh Patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom.<sup>1</sup>

Pada tahun 1859, pemerintah memutuskan untuk membagi wilayah Surabaya menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Dengan demikian, maka Kabupaten Sidokare telah berpisah dengan Kabupaten Surabaya dan membentuk pemerintahan sendiri dengan bupati pertama R. Notopuro (R. T. P Tjokronegoro) yang bertempat di kampung Pandean. Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10/1859

---

<sup>1</sup> Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur, *Monografi Daerah Kabupaten Sidoarjo* (Sidoarjo: Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Jawa Timur, 1973), 5.

tanggal 28 Mei 1859 *Staatsblad* (Lembaran Negara pada zaman Kolonial Belanda) nama Sidokare kemudian diganti dengan nama Sidoarjo.<sup>2</sup>

Secara Topografi, Sidoarjo merupakan daratan delta yang makmur, karena lebih dari 60% daerahnya digunakan untuk pertanian dan tambak. Karakter lahan delta yang subur menjadikan Sidoarjo sebagai lumbung berbagai hasil pertanian. Hal ini dibuktikan oleh peninggalan Candi Pari di Porong yang dibangun pada masa Majapahit, tepatnya tahun 1293 Caka atau 1371 M. Sebagaimana tertulis dalam kitab Negara Kertagama. Candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sebagai bentuk ucapan syukur karena menjadikan kawasan di sekitarnya lumbung pangan bagi kerajaan Majapahit. Pemerintahan Kolonial Belanda menggunakan potensi tersebut untuk mengembangkan Sidoarjo menjadi kota Industri.<sup>3</sup>

Banyak pendatang dari Surakarta, Jawa Tengah, daerah pesisir Gresik dan Madura sejak tahun 1820, hal ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah yang padat penduduknya di Jawa Timur. Mayoritas populasinya adalah petani.<sup>4</sup> Sidoarjo menjadi kota metropolisme yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Berdiri belasan pabrik gula, rel-rel kereta, dan jalan raya. Pada

<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam [www.sidoarjokab.co.id/index.php?p=layanan&p2=profil\\_kabupaten](http://www.sidoarjokab.co.id/index.php?p=layanan&p2=profil_kabupaten) (Diakses pada tanggal 4 Maret 2017).

<sup>3</sup> Jaludieko Pramono, *Sidoarjo Pusat Industri Gula Paling Potensial di Masa Kolonial*, pada 24 Agustus 2013 dalam <http://m.kompasiana.com/jaludieko/Sidoarjo-pusat-industri-gula-paling-otensil-di-masakolonial/552df5756ea> (Diakses pada 5 Maret 2017)

<sup>4</sup> M. R Fernando, "*Journal of Southeast Asian Studies: The Trumpet Shall Sound for Rich Peasants: Kasan Mukmin's Uprising in Gedangan, East Java, 1904*" terj. Zizi (Singapore: National University of Singapore, 1995), 246.

tahun 1880, para juragan Cina yang di dukung penuh oleh pemerintah kolonial Belanda, mulai menjadikan Sidoarjo sebagai salah satu sentra produksi gula.

## **B. Struktur Sosial Dan Ekonomi**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memperhatikan perkembangan keresahan masyarakat dalam korelasinya antara sistem sosial dan adanya kelas-kelas ekonomi. Sidoarjo merupakan satu wilayah yang sistem perekonomiannya bersifat agraria, karna mayoritas penduduknya adalah petani. Di Sidoarjo, kaum tani terbagi menjadi dua kelas yaitu gogol atau petani pemilik sawah yang berada di kelas menengah dan para buruh tani yang berada dibawahnya. Hampir dari separuh masyarakat Sidoarjo adalah gogol.<sup>5</sup> Sedangkan masyarakat kelas atas adalah pemilik lahan besar. Sudah lazim bahwa dalam suatu komunitas pedesaan terdapat klasifikasi tradisional yang didasarkan pada kepemilikan tanah. Hal ini relevansinya dengan Sidoarjo sebagai daerah yang dijadikan tempat pemberontakan adalah karena Belanda menggunakan klasifikasi ini untuk mengatur kembali tatanan sosial dalam masyarakat sesuai dengan tujuannya. Dari waktu ke waktu banyak anggota baru yang bergabung menggantikan anggota yang lama, tapi tidak ada peningkatan kedudukan yang terjadi dan

---

<sup>5</sup> Ibid., 246.

sedikit sekali cabang dari keberadaan pemilik sawah walaupun populasi tumbuh pesat.<sup>6</sup>

Seperti dilansir oleh Sartono Kartodirdjo dalam bukunya, bahwa fakta yang mempengaruhi kondisi-kondisi penentu dalam kehidupan di daerah pedesaan adalah menyangkut pemilikan tanah dan penyewaan tanah.<sup>7</sup> Fakta tersebut menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan dan berapa besar bagian yang akan mereka peroleh dari hasilnya.<sup>8</sup> Ada perbedaan yang mencolok antara petani pemilik lahan dalam menghitung luas pertanian yang membedakan kekuatan ekonomi mereka dan posisi status.<sup>9</sup> Di seluruh kabupaten, pemilik lahan kecil dengan kurang dari 0.5ha sawah, dan itu tidak cukup untuk menghidupi keluarga mereka, sehingga mereka harus mencari sumber pendapatan lain untuk bertahan hidup. Separuh dari semua gogol di kabupaten adalah petani kelas menengah yang memiliki sawah 0.7 ha, cukup untuk menghidupi 5 orang. Sisanya 5% dari semua gogol di Sidoarjo adalah pemilik lahan besar dengan kepemilikan sawah 0.8 sampai 4 ha. Ini memungkinkan pendapatan pokok dari menanam pangan untuk dijual.

Untuk memiliki hak mereka sebagai gogol, petani pemilik lahan besar juga menyewakan sawah dari petani kecil, praktek yang sudah di jalankan di

---

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani di Banten 1888*(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 66.

<sup>7</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), 56.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 58.

pedesaan Sidoarjo. Sebelumnya, gogol-lah yang mempunyai control penuh terhadap sawah dari petani kecil melalui perjanjian sewa. Namun, pemilik lahan besar ikut menyewakan sawah melalui perjanjian sewa di Gedangan, Sidoarjo, dan Porong. Lebih dari seperempat dari seluruh sawah di seluruh kabupaten dikontrol oleh pemilik lahan besar dan lebih dari 21% sawah telah disewakan oleh petani pemilik lahan besar. Petani pemilik lahan besar dapat dengan mudah menyembunyikan transaksi mereka dengan pertolongan dari perangkat desa. Contohnya, haji Kadir di desa Babatan, Ginonjo, Porong mengontrol 289 ha sawah dan haji Abdurrachman di Sidoarjo 258 ha. Para pemilik tambak adalah kelompok makmur lainnya di kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkatan yang sama dengan para petani pemilik lahan besar. Di Gedangan sendiri sekitar 2000 orang memiliki 5000 ha tanah untuk tambak di Sidoarjo dan porong, 855 dan 532 orang memiliki 3, 224 ha dan 2, 736 ha tanah untuk tujuan yang sama. Para pemilik tambak ini bertujuan untuk bisnis yang lebih menguntungkan, yang didapatkan dari biaya sewa tinggi di perikanan. Beberapa pemilik tambak adalah orang kaya yang memiliki kapal untuk mencari ikan di laut.<sup>10</sup>

Sebagian besar petani pemilik lahan besar, pemilik tambak, pengusaha pabrik dan pedagang merupakan orang yang makmur yang meningkatkan kekayaan dan status social mereka dengan pergi haji, banyak dari mereka yang

---

<sup>10</sup>R. Fernando “, The Trumpet Shall for Rich Peasants: Kassin Mukmin’s Uprisingin Gedangan East Java 1904,” *Journal Southeast Asian Studies, International Bibliography of The Social Sciences*, Singapore: National University of Singapore Pushising Online (1995), 249.

pergi ke Makkah. Jumlah para haji yang didominasi oleh para petani pemilik lahan besar bertambah pesat di Surabaya dan jumlah yang paling besar adalah dari Sidoarjo, tepatnya di Gedangan dengan 633 haji dari 2, 035 di seluruh Kabupaten. Merupakan sesuatu yang wajar bahwa di daerah yang mayoritas penduduknya muslim, status Kyai dan Haji sangat tinggi, bahkan mereka dipandang sebagai prestise sosial. Haji dalam buku Sartono Kartodirdjo dijelaskan memiliki 3 kategori:

1. Haji adalah orang yang pergi ke Makkah atas kemauan sendiri dan dengan biaya sendiri.
2. Mereka yang dikirim kesana oleh orang tua mereka atau kerabat mereka untuk belajar teologi dan yang biasanya bermukim lama di Tanah Suci.
3. Mereka yang mempunyai nama burrk dan didesak anggota keluarganya mereka untuk naik haji agar mereka bertaubat.<sup>11</sup>

Para haji merupakan orang-orang kaya dan berjiwa wirausaha dan berbeda dengan penduduk desa lainnya, karena mereka pergi haji ke Makkah untuk menunjukkan bahwa mereka kaya raya. Sebagian besar para haji di Sidoarjo adalah pemilik lahan pertanian yang makmur dan mempunyai skill berbisnis yang bagus. Progress penghasilan bisnis dan kesuksesan mereka membuat pihak penjajah menyegani sebagai orang pedesaan yang kapitalis, karena sebagian besar haji mempunyai aktivitas ekonomi yang luas. Mereka memerankan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi pribumi dengan menyuplai dana dan keahlian berdagang untuk perdagangan di desa dan memproduksi pada masa itu.

---

<sup>11</sup>Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani di Banten 1888*, 85.

Dengan pengalaman yang di dapat sepulang dari Makkah, para haji menjadi lebih religius dan memperbanyak kegiatan agama yang membentuk hubungan dekat dengan pesantren. Pesantren adalah sekolah agama yang memiliki peran penting dalam membentuk kepemimpinan pedesaan yang religious. Pemimpinnya disebut kyai, yang berasal dari petani makmur yang besar, pedagang, pemberi pinjaman uang dan yang memiliki jaringan dengan elemen-elemen bisnis di daerah pesisir. Mereka mempromosikan gaya hidup Islam *Ortodoksyang* mengkombinasikan dengan semangat berdagang.<sup>12</sup>

Namun, Sidoarjo merupakan daerah kecil yang ekonominya bermasalah meliputi kaum tani dalam pertumbuhandaerah penghasil gula di Jawa. Hal ini membuat masyarakat melakukan tindakan perlawanan karena merasa dirugikan. Ada hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli, yang menjadi sekutu dekat birokrasi penjajah. Dan ini membuat mereka mencari orang yang bisa meredam kesusahan mereka. Pencarian mereka ini membawa lebih dekat kepada kepemimpinan yang lebih religious.<sup>13</sup>

Di Gedangan, terdapat sebuah sungai yang menjadi nadi bagi desa yang membujur menuju kota Surabaya dan mengalir pedalaman sawah-sawah. Sungai tersebut adalah Kali Pepe. Di belantaran Kali Pepe terdapat sebuah

<sup>12</sup>Fernando, "The Trumpet Shall Sound for Rich Peasants: Kasan Mukmin's Uprising in Gedangan, East Java, 1904" *Journal of Southeast Asian Studies*, 245.

<sup>13</sup> Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani di Banten 1888*, 68.



pesantren yang di pimpin oleh seorang Kyai yang sangat disegani oleh penduduk desa, yaitu Kyai Hasan Mukmin. Pengaruhnya meliputi wilayah-wilayah sekitar Sidoarjo, diantaranya Mojokerto, Malang, dan Surabaya. Pesantren Gedangan seperti pesantren lainnya di Jawa Timur, termasyhur karena kealiman Kyainya.<sup>14</sup>

Pesantren di desa Gedangan terletak di sebelah Timur jalan raya yang membujur jaringan jalan kereta api dari Utara ke Selatan. Areal desa yang luasnya 200 hektar ini dihuni oleh penduduk sekitar 500. 000 orang. Dengan lintasan jalan raya dan kereta api, masyarakatnya mudah untuk melakukan pengiriman dan jual beli ke kota. Seperti yang juga tertulis dalam arsip yang dimuat oleh Jurnal Internasional tulisan MR. Fernando, bahwa petani Gedangan lebih banyak membawa hasil bumi mereka ke Sidoarjo dan Porong karena selain dekat, pasar-pasar disana juga ramai. Kedamaian pesantren dan ketentraman desa Gedangan merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat Gedangan, walaupun umumnya penduduk Gedangan terdiri dari petani dan pekerja kasar.<sup>15</sup>

Pemerintah Belanda yang menilai Gedangan sebagai pusat para santri dan kuatnya tali persaudaraan masyarakat pesantren tidak mau memisahkan pesantren ini dengan gejolak politik yang sedang bergejolak di Asia pada waktu itu. Politik yang mengarah pada perjuangan kemerdekaan bagi rakyat terjajah. Tersebutlah nama-nama pendekar pergerakan, diantaranya: Cokroaminoto,

---

<sup>14</sup> Djamil Soeherman, *Pejuang-pejuang Kali Pepe* (Bandung: Pustaka, 1984), 1.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 2



Diponegoro, Samanhudi dan lain-lain. Hal ini membuat Belanda lebih mengawasi kegiatan-kegiatan pesantren dan santri dengan kacamata politik. Di pesantren para santri tidak hanya belajar ilmu agama, namun juga dibekali kepandaian membela diri, seperti silat dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pesantren Gedangan adalah pesantren yang cukup luas. Didalamnya terdapat pondok-pondok sederhana untuk ratusan santri yang menetap. Terdapat gerbang yang terbuat dari potongan batang-batang kelapa tua dan kasar dengan palang-palang bambu yang kuat. Diatas pintunya berjajar kalimat dalam bahasa Arab yang ditulis tangan “*Masuklah ke dalamnya dengan selamat dan sentosa*”. Ada sebuah masjid yang menonjol menghadap pintu gerbang, yang terdapat di dalamnya menara setinggi 20 meter dan kolam tempat wudhu jamaah. Di sebelahnya ada rumah kediaman Kyai dengan keluarga kemudian ada juga kompleks makam leluhur yang sangat dihormati oleh warga-warga desa khususnya warga pesantren Gedangan.<sup>17</sup>

Dalam penelusuran peneliti, tidak terdapat satupun sisa atau peninggalan dari pesantren Gedangan yang masih berdiri hingga saat ini. Hal ini dijelaskan dalam novel **Djamil Soeherman**, bahwa kompleks pesantren akan diratakan dengan tanah dan dibangun diatasnya jalan rel Kereta Api kembar, atau

---

<sup>16</sup> Ibid., 18

<sup>17</sup> Ibid., 4

sekarang disebut dengan lori (kereta pengangkutan barang)<sup>18</sup>. Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa hal ini adalah penyebab utama, kemarahan Kyai Mukmin sehingga melakukan perlawanan sedemikian rupa.

Dalam arsip Belanda yang dijadikan rujukan baik dari buku Sidoarjo Tempo Doeloe oleh Dukut Imam Widodo dan Jurnal Internasional oleh MR. Fernando, sama sekali tidak disebutkan hal ini. Tidak disinggung terkait pondok Gedangan dan hegemoni masyarakat Gedangan saat itu. Yang tertulis hanya kemarahan dari beberapa petani yang kemudian dikumpulkan oleh Kyai Hasan Mukmin untuk diarahkan menuju sebuah perlawanan.

### C. Konflik Tanah

Seperti yang sudah peneliti jelaskan diatas bahwa Sidoarjo merupakan wilayah yang mempunyai tingkat ekonomi cukup baik pada zamannya. Sidoarjo sebagai sebuah daerah subur memang begitu menjanjikan. Banyak lahan yang digunakan untuk pertanian dan tambak-tambak ikan. Dibangun pula industri-industri untuk menyokong perdagangan dalam dan luar negeri bagi pemerintah Hindia Belanda yang saat itu sedang dalam keadaan bangkrut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk perang yang tidak hanya memakan banyak korban jiwa, tapi juga harta

---

<sup>18</sup> Lori yang dibangun kemungkinan berada di pabrik gula Sruni, namun pabrik Gula Sruni sudah bertransformasi menjadi Markas Militer Arhanudse, Jadi hasil dari diskusi yang peneliti lakukan dengan beberapa orang menyimpulkan bahwa jalur kereta yang dibangun adalah di sekitar pabrik gula Sruni tadi, karena kereta-kereta yang dibangun saat itu dijadikan penyokong ekonomi Pemerintah Belanda sebagai angkutan barang. Nawawi, *Wawancara*, Krembung, 02 Maret 2017

benda dan keuangan negara. Perang Jawa yang berakhir pada tahun 1830 telah menguras kas pemerintah, disamping itu Belanda juga sedang berperang dengan Belgia hingga tahun 1839. Raja Belanda Willem I kebingungan mencari solusi untuk mengisi kembali kas pemerintah yang kosong. Dalam keadaan seperti itu muncullah, Joannes Van den Bosch yang akhirnya diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Timur atau Indonesia.<sup>19</sup>

Konsep pemikirannya ia tuangkan dalam *Cultuurstelsel* atau yang lebih dikenal dengan tanam paksa. Dewan Hindia yang sudah terbentuk sebelumnya di tanah jajahan ini menolak mentah-mentah gagasan itu. Menanggapi itu Van den Bosch mengganti seluruh anggota dewan dengan orang-orang pilihannya sendiri.

Pokok pemikiran dalam stelsel itu sebagai berikut :

1. Dalam perjanjian dengan petani pribumi ditentukan 1/5 dari tanahnya disewakan untuk penanaman hasil-hasil bumi yang laku di pasaran Eropa terutama: tebu, nila, kopi dan hasilnya dijual kepada Pemerintah Hindia Belanda menurut harga pasar.
2. Penguasaan tanah untuk hasil-hasil bumi bagi pasran Eropa tidak boleh melebihi penguasaan sawah untuk padi.
3. Tanah yang disediakan utuk hasil-hasil bumi bagi pasaran Eropa itu bebas dar pajak bumi.

---

<sup>19</sup>Dukut Imam Widodo, *Sidoardjo Tempo Doeloe* (Surabaya: DukutPublishing, 2013), 123.

4. Jika hasil bumi yang dijual kepada pemerintah Hindia Belanda harganya ditaksir melebihi pajak bumi, maka kelebihannya itu dikembalikan kepada petani pribumi.
5. Tanaman-tanaman yang gagal panen asal bukan karena kesalahan petani pribumi, menjadi tanggung Jawab Pemerintah Hinda Belanda.
6. Petani pribumi bekerja dibawah pimpinan kepalanya, sedangkan pegawai-pegawai Eropa memperhatikan, supaya pengusahaan tanah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan pengangkutan hasil buminya ditentukan dengan selayaknya.
7. Pengusahaan tanah itu boleh dibagi-bagi: sebagian petani pribumi menanam dan memelihara tanam-tanaman itu sampai layak panen, sebagian yang lain memungut, ada yang mengangkat dan sisanya bekerja di pabrik-pabrik bila buruh sukarela tidak mencukupi.
8. Petani pribumi yang bukan petani harus membayar uang kepala atau sebagai gantinya 1/5 dari waktunya diserahkan kepada gubernemen degan melakukan pekerjaan rodi 66 hari setahun di kebun-kebun Pemerinah Hindia Belanda.<sup>20</sup>

*Cultuurstelsel* ini berlaku di seluruh wilayah Hindi Belanda termasuk juga di Sidokare (kini, Sidoarjo) yang tanahnya dikenal sangat subur karena terletak di Delta Brantas. Pada dasarnya kondisi ini tidak buruk akan tetapi dalam

---

<sup>20</sup> Ibid., 124

prakteknya tidak demikian, sehingga *Cultuurstelsel* itu sangat merugikan petani pribumi.

Pemerintah Hindia Belanda bukannya mengikat perjanjian dengan petani anak negeri, melainkan melakukan paksaan. Terutama pegawai-pegawai negeri, baik pegawai Eropa maupun pegawai Hindia Belanda, yang disertai mengawasi turut memberatkan beban petani pribumi.

Adapun mereka yang mendapat sebagian hasil sebagai hadiah, yang disebut: *Cultuurprocenten*<sup>21</sup>, karna itulah mereka berdaya upaya memperbesar produksi. Maka acapkali bukan 1/5 saja dari tanah petani pribumi yang diambil, namun 1/3, kadang-kadang 1/2, bahkan kadang-kadang seluruhnya. Dan tanah yang dipilih adalah tanah yang baik-baik.

Pemerintah Belanda yang saat itu memang membutuhkan banyak uang, tidak mampu menutaskan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Lagi pula petani anak negeri dipaksa bekerja lebih lama dari waktunya. Kadangpula petani pribumi harus bekerja berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di tempat yang jauh dari desanya, tanpa jatah makan.

Dalam perkebunan tebu petani pribumi harus menggali selokan-selokan, menebang kayu, membuat batu bata dan genting untuk pabrik-pabrik gula. Pajak bumi, yang dijanjikan akan dihapuskan atas tanah yang dipakai oleh Pemerintah Belanda tidak dihapuskan. Malah sebaliknya yang terjadi, jumlah pajak yang

---

<sup>21</sup>*Cultuur Procenten* adalah hadiah atau bonus bagi pelaksana sistem tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil tanaman melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Lilis Melasanti, "Pengertian *Culturr Procenten*" dalam <http://lilismeliasanti.blogspot.co.id> (Diakses pada 14 Maret 2017)

dipungut pada tahun 1830 dari 6 juta golden, maka pada tahun 1845 meningkat menjadi 11 juta golden. Selain dari itu, dari pajak-pajak istimewa seperti: pajak pasar, penangkapan Ikan-termasuk bandeng, pajak jalan, dan puluhan jenis pajak lainnya, pemerintah Hindia Belanda bisa memperoleh 10 juta golden tiap tahunnya.

Harga hasil-hasil bumi bagi pasaran Eropa itu dibayar Pemerintah Hindia Belanda tidak seperti dijanjikan menurut harga pasar, namun menurut harga penetapan Pemerintah Hindia Belanda sendiri, yang biasanya menurut harga taksiran yang serendah-rendahnya. Disamping itu rakyat masih dibebani juga dengan pekerjaan rodi, seperti: pemeliharaan jalan, jembatan, saluran dan masih banyak lagi. Tidak itu saja, mereka juga dipaksa untuk melakukan pekerjaan bagi pangreh praja juga pekerjaan untuk desa. Maka lengkap sudah penderitaan yang harus ditanggung oleh rakyat negeri ini. Maka tidaklah mengherankan jika penduduk pribumi banyak yang sudah habis kesabarannya.<sup>22</sup>

Pada tahun 1833, para petani yang dipaksa bekerja di kebun-kebun tebu yang ada di Pasurun dan Sidokare (Sidoarjo kini) mengadakan pemberontakan hebat. Namun pemberontakan itu, berhasil ditumpas oleh serdadu-serdadu kompeni yang di sewa oleh para tuan besar pemilik Ondeneming (perkebunan) yang tidak lain adalah rakyat Indonesia sendiri, yaitu penduduk Sidokare. Industri gula Sidoarjo merupakan yang paling potensial di Nusantara, karena tercatat ada kurang lebih 13 pabrik gula yang berdiri di

---

<sup>22</sup> Widodo, *Sidoarjo Tempo Doeloe*, 126.



Sidoarjo. Diantaranya Pabrik Gula Ketegan, Taman, Sruni, Gedangan, Buduran, Candi, Tulangan, Krembung, Wonoayu, Krian hingga Watu Tulis, Prambon. Untuk menyokong kelancaran industri tersebut, pemerintah kolonial Belanda juga menyediakan transportasi teranggih pada zamannya, yaitu kereta api. Hal ini dapat dilihat dari padatnya jaringan jalur kereta api di Sidoarjo.<sup>23</sup>



24

<sup>23</sup>Tim Penelusuran Sejarah Sidoarjo, *Jejak Sidoarjo: Dari Jenggala ke Suriname*, (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006), 59.

<sup>24</sup> Peta yang menjadi acuan para keluarga Belanda di Jawa Timur pada tahun 1900. Berdasarkan peta tersebut terlihat jalur rel Kereta Api yang mengurung Sidoarjo di Timur dan Barat kota. Di peta ini tergambar bahwa kedua jalur Kereta Api dihubungkan oleh sebuah lintasan antara Sidoarjo dan Tarik. Semua lintasan ini bersifat ekonomi karena sengaja dibangun sejajar atau berdekatan dengan



Meskipun perkembangan industri di Sidoarjo begitu pesat, namun hal tersebut ternyata masih belum mampu memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Terbukti dengan banyaknya konflik hingga muncullah kebijakan-kebijakan yang hanya memberi keuntungan pada pihak pemerintah dan perusahaan swasta asing saja. Rakyat yang sudah puluhan tahun memiliki tanah secara turun temurun itu dipaksa untuk menyerahkan, menjual atau menyewakan tanahnya agar dapat digunakan sebagai lahan penanaman tebu.

Sebenarnya lahan tersebut tidak hanya digunakan untuk penanaman tembus saja. Namun juga untuk kepentingan bangunan pabrik gula, seperti perkantoran, kediaman administrator, balai pertemuan, gudang-gudang, perumahan pegawai, perbekalan dan masih banyak lagi.

Pengelolaan perkebunan tebu yang telah dikuasai oleh para raja gula itu seringkali tidak menggunakan etika. Hampir semua perkebunan tebu yang berdekatan dengan ladang palawija milik petani, dibanjiri oleh air ketika diadakan penyiraman malam hari pada perkebunan tebu. Hal itu sengaja dilakukan untuk merusak ladang tersebut. Kemarahan para petani pun para ditanggapi dengan maksud agar para petani menyerah dan memberikan tanahnya kepada mereka. Belanda terus melakukan penekanan-penekanan terhadap rakyat dengan memunculkan peraturan baru jika tanah tersebut dijual atau disewakan

---

kompleks industri (lingkaran kecil) yang menyebar di sekujur Sidoarjo. Dari banyaknya jalur Kereta Api ini menunjukkan bahwa Sidoarjo sejak dulu merupakan daerah industri yang maju. Dikutip dari tulisan Jaludieko Pramono, "*Lintas Sejarah Industrialisasi Sidoarjo*" dalam <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/Sidoarjotempodulu/posts> (Diakses pada 7 April 2017).



pengaruh yang tak sepatasnya dalam urusan desa dan membahayakan kepentingan industri gula.

Industri gula telah berkampanye melawan legislasi penyewaan lahan lama yang mana tidak mengizinkan mereka se bebas yang mereka inginkan. Industri gula tidak suka dipaksa untuk memperoleh izin dari dua pertiga dari semua pemilik lahan untuk menyewa pada waktu tertentu, waktu dimana sulit untuk mendapatkan hasil memuaskan di desa, dimana sedikit petani pemilik lahan besar mengontrol urusan desa. Oleh karena itu, pabrik gula bisa menyewa hanya sepertiga dari sawah yang diberikan desa dan tidak bisa disewakan sebelum bisa ditanami dengan tebu. Pabrik gula mencoba untuk mengatasi pembatasan ini dengan memberikan hadiah untuk perangkat desa, dan pada saat bersamaan mengkampanyekan peraturan yang lebih fleksibel.

Pada tahun 1846 petani anak negeri yang bekerja di perkebunan tembakau membakar 7 bidang kebun tembakau. Banyak pula petani yang merasa putus asa lantas meninggalkan kampung halamannya dan menjadi pemberontak. Akibatnya banyak sawah ladang yang terbengkalai, sehingga menyebabkan padi tidak bisa dipanen dan menimbulkan bahaya kelaparan.<sup>26</sup>

Di Cirebon, bahaya kelaparan yang terhebat terjadi pada tahun 1844. Lalu di Demak, pada tahun 1848. Penduduknya yang semula berjumlah 336 ribu jiwa tinggal 120 ribu jiwa. Di Grobogan, pada tahun 1849 yang lebih parah lagi penduduknya yang semula berjumlah 89.500 tinggal 9000 jiwa saja.

---

<sup>26</sup> Widodo, *Sidoardjo Tempo Doeloe*, 125.

Bagi Belanda, politik tanam paksa itu sangat menguntungkan. Sampai tahun 1834 pukul rata 3 juta golden dikirimkan ke negeri Belanda tiap tahunnya. Setelah itu, tiap tahun 12-18 juta golden. Jumlah semua uang yang masuk ke kas negeri Belanda dari *Cultuurstelsel* adalah 900 juta golden. Uang tersebut sebagian besar dipakai untuk melunasi piutang negara dan untuk biaya pemasangan jalan kereta api.<sup>27</sup>

Bukan negeri Belanda saja yang bisa menikmati *Cultuurstelsel* itu. Ada juga kongsi dagang *Neederland Haandle Maaschappij* yang diberi hak monopoli untuk mengangkut hasil bumi negeri ini dan dibawa ke Eropa dengan kapal-kapal mereka. Belum cukup dengn itu, kongsi dagang ini juga punya hak monopoli atas penjualannya disana. Maka kongsi dagang inipun semakin kaya.

Kongsi dagang ini yang diberi hak monopoli untuk mengangkut hasil bumi negeri ini dan dibawa ke Eropa dengan kapal-kapal mereka. Belum cukup dengan itu kongsi dagang ini juga memiliki hak monopoli atas penjualannya di sana. Namun rakyat negeri ini yang telah mengorbankan jiwa dan raganya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mendapatkan keuntungan berupa pengetahuan terhadap tanaman-tanaman baru itu saja. Upaya penghapusan keuntungan dari *cultuurestelsel* untuk negeri Belanda yang diperoleh dengan darah dan keringat para petani anak negeri ternyata membawakan kesengsaraan bagi petani pribumi itu sendiri. Karenanya beberapa tokoh di Belanda banyak yang beranggapan bahwa Belanda mempunyai kewajiban moral yang mesti

---

<sup>27</sup> Ibid., 126



oleh cita-citanya yang maju terpaksa harus meninggalkan Indonesia. Di negeri Belanda yang menjadi anggota majelis rendah yang dengan kepandaiannya berpidato menyerang *cultuurestelsel*.

Tahun 1859 nama Sidokare berubah menjadi Sidoarjo. Sementara itu pertentangan berjalan terus menerus. Banyak buku dan brosur yang diterbitkan untuk menentang *cultuurestelsel* dan mengajukan kerja merdeka. Kaum yang pro *cultuurestelsel* membalas pula dengan buku-buku dan risalah-risalah. Ada sebuah buku yang sangat menggemparkan pada masa itu yaitu buku *Max Havelaar of the koffe-veilingen der Nederlandsche Handlemaatschappij atau pelelangan-pelelangan kopi Nederlandsche Handlemaatschappij*. Pada tahun 1860 buku itu ditulis oleh Edward Douwes Dekker (2 Maret 1820 sampai 19 Februari 1887). Ia dikenal dengan nama penanya *Multatuli*, dari bahasa latin yang artinya *saya telah banyak menderita*.<sup>29</sup>

Di dalam buku itu ia banyak menceritakan tentang kemelaratan penduduk Jawa. Ia pun menganjurkan pula pergantian kerja paksa dengan kerja merdeka. Begitu pula terjalin di dalam bukunya pembelaan akan penduduk pribumi atas perlakuan sewenang-wenang terhadap mereka dengan

---

<sup>29</sup> Di dalam buku *Max Havelaar*, Douwes Dekker banyak menceritakan riwayat hidupnya sendiri terutama ketika ia menjabat sebagai Asisten Residen Lebak. Pada waktu itu Bupati Lebak mengerahkan penduduk untuk bekerja tanpa upah untuk membersihkan rumput di pekarangan kabupaten karena Bupati Cianjur akan berkunjung ke Bupati Lebak. Bagi Edward Douwes Dekker tindakan Bupati Lebak itu sangat berlebihan dan tidak manusiawi. Iakemudian membuat laporan ke Residen, tapi laporannya tidak digubris bahkan ia dituduh terlalu tergesa-gesa, sebab hal semacam itu sudah biasa. Douwes Dekker lalu membuat laporan ke Gubernur Jenderal yang sudah ia kenal secara pribadi. Selagi lagi ia dipersilahkan dan bahkan dipindah ke Ngawi sebagai wakil Asisten Residen. Ia akhirnya mengundurkan diri. *Multatuli*, Max Haveelar (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014)





Undang Bumi itu bertujuan supaya pengusaha-pengusaha particular yang menggantikan perusahaan pemerintah Hindia Belanda memperoleh tanah yang diperlukannya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan. Disamping itu pula hak milik petani anak negeri atas tanah yang diusahakannya ditetapkan dengan pasti. Undang-Undang itu menetapkan bahwa pemerintah Hindia Belanda dapat menyewakan tanah kepada tiap-tiap orang selama 75 tahun lamanya. Begitu juga yang berlaku di Sidoarjo, hanya tanah yang tidak dimiliki petani anak negeri yang boleh disewakan. Penyewaan tanah oleh petani anak negeri kepada orang asing diperbolehkan. Semua ketentuan itu juga berlaku di Sidoarjo

Beberapa *belsuit* (keputusan) atau surat keputusan untuk melakukan Undang-Undang Bumi itu menjelaskan tujuan misalnya bila *Belsuit Agraria* pada tahun 1870, yang terdapat pernyataan tentang tanah kepunyaan negara (*domeinverklaring*) ialah bahwa sekalian tanah yang tidak dibuktikan hak pihak lain. Demikian juga ordonansi-penyewaan-tanah tahun 1981 menetapkan syarat-syarat penyewaan tanah kepada orang asing, misalnya maksimum lamanya penyewaan tanah dan juga penetapan pembayaran dimuka.<sup>31</sup>

Akan tetapi penjualan tanah oleh petani pribumi pada orang asing dilarang keras. Maksudnya ialah untuk melindungi petani anak negeri supaya tanah yang menjadi mata pencahariannya, tidak hilang. Namun keadaan sesungguhnya selalu menyimpang dari penetapan itu. Petani anak negeri

---

<sup>31</sup> Ibid., 126.

biasanya dibiarkan saja menyerahkan tanahnya kepada orang asing, bahkan dibiarkan juga pengusaha kebun asing memaksa petani anak negeri dengan bermacam-macam tipu muslihat menyewakan tanahnya. Sama halnya dengan menyerahkan atau memindahkan hak milik petani anak negeri kepada pengusaha asing itu. Kasus semacam ini banyak terjadi di Sidoarjo. Demikianlah pintu dibuka bagi pengusaha *Orderneming* partikular. Maka pada tahun 1870 berkembang lah modal asing dari Belanda, Inggris dan Amerika di Hindia Belanda atau Indonesia.<sup>32</sup>

Peraturan sewa yang baru pada tahun 1900 membatasi beberapa batasan sebelumnya, mengizinkan perangkat *local* memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengelakkan halangan yang dihadapi oleh industri gula. Para petani pemilik lahan besar di Sidoarjo tidak suka menyewakan sawah mereka kepada pabrik gula untuk alasan ekonomi yang sederhana. Pabrik gula *local* membayar biaya sewa kurang dari sewa yang dibayarkan di kabupaten Jombang dan Mojokerto. Di Sidoarjo, pabrik gula membayar f. 40 sampai f. 60 per *bouw* (0.7 ha) setahun di tahun pertama sewa dan dari f. 32 sampai f. 50 per *bouw* setahun ditahun berikutnya, sedangkan di mojokerto, pabrik gula membayar dari f. 70 sampai f. 80 per *bouw* setahun. Hasil sewa sangat rendah dibandingkan dengan

---

<sup>32</sup> Jaludieko Pramono, *Sidoarjo Pusat Industri Gula Paling Potensial di Masa Kolonial*, pada 24 Agustus 2013 dalam <http://m.kompasiana.com/jaludieko/Sidoarjo-pusat-industri-gula-paling-otensil-di-masakolonial/552df5756ea> (Diakses pada 5 Maret 2017)

apa yang petani bisa hasilkan dari jumlah penanaman dengan hasil panen untuk dijual, sebesar f. 150 per bouw setiap lahan setahun.<sup>33</sup>

Pejabat penjajah maupun industri gula mengauai bahwa kebutuhan untuk berkeepakatan dengan para petani dan keduanya saling diuntungkan. Dan penyewaan sawah kepada pabrik gula merupakan keuntungan dalam kesulitan keuangan yang dialami petani kecil.

Untuk membuat kesepakatan dengan petani pemilik lahan besar, pabrik gula di Sidoarjo mencari pertolongan administrasi *local*, yang dikepalai oleh L. A Arends yang mana membuat rencana untuk pabrik gula bisa menyewa semua sawah di sebuah desa untuk periode waktu tertentu, dengan 1/3nya ditanami tebu setiap tahunnya. Rencana ini memberikan pabrik gula lahan luas untuk digunakan seperti yang mereka inginkan. Pabrik gula harus membayar sejumlah uang untuk menutupi biaya sewa lahan sawah di desa, jumlahnya lebih kecil daripada jumlah yang dibayarkan kepada petani sebelum perjanjian sebelumnya. Perubahan ini tidak memperdulikan pembatasan legal yang mana melarang penyewaan sawah secara keseluruhan di sebuah desa, keberanian *Arends* (Residen Surabaya) menggembor-gemborkan tahap baru dalam hubungan antara pemerintah *local* dan industri gula. Pejabat *local* dengan legowo terhadap industri merasa yakin bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum tidak

---

<sup>33</sup> Fernando, "The Trumpet Shall Sound for Rich Peasants: Kasan Mukmin's Uprising in Gedangan, East Java, 1904", *Journal of Southeast Asian Studies*, 247.

akan membahayakan karir mereka, mengetahui golongan yang berkuasa dari birokrasi penajahan yang mendukung industri gula.

Peraturan pertama berasal dari dampak di Bulang dimana 6 pabrik gula bersaing dengan petani pemilik lahan besar dan segera diterapkan di bagian lainnya dengan bantuan pejabat desa yang berkuasa. Hal itu diklaim menguntungkan para petani yang tidak lagi terusik dentang pembayaran sewa lahan, dan menyulitkan kepala desa. Rencana baru juga digambarkan sebagai solusi untuk penyalahgunaan dalam sewa lahan yang dilakukan oleh petani pemilik lahan besar yang memiskinkan petani kecil dan memberikan kesulitan untuk pabrik gula. Para pejabat mengakui bahwa pabrik gula dirasa diuntungkan dari perjanjian baru, yang mana tidak hanya mengurangi biaya sewa tanah tapi juga mengurangi persaingan para petani pemilik lahan besar.<sup>34</sup>

Sebagian besar petani pemilik lahan besar di Sidoarjo akan mempertimbangkan rencana perjanjian sewa baru yang akan mengguncang kepentingan ekonomi mereka, hal itu mengurangi pendapatan mereka dari penyewaan lahan sawah ke pabrik gula. Sekarang pabrik gula membayar sewa tahunan f. 15 per *bouw* setiap sawah kepada kepala desa, dan pembayaran di awal. Di rapat yang digelar di sekitar pabrik gula Sruni, kyai Botokan, teman Kyai Mukmin, menuduh kepala desa dan para pejabat desa terlibat dalam perjanjian sewa baru yang tidak menguntungkan petani, tepatnya para petani pemilik lahan besar yang mana tidak sudi menyewakan lahannya ke pabrik gula.

---

<sup>34</sup> Ibid., 248.

Perjanjian sewa baru menyebabkan perjanjian baik diantara petani di Bulang: pemimpin atau Wedono Raden Joyo Adi Ningrat secara terbuka menyatakan tidak suka dan bersikap pasif terhadap para petani tentang penyewaan sawah mereka.

Di Gedangan, perjanjian sewa baru diperkenalkan sebelum pemberontakan, petani pemilik lahan besar memfokuskan kepentingan mereka dan di Keboanpasar, dimana pemberontakan terjadi, pemilik lahan besar seperti Haji Kadir secara terang-terangan melawan peraturan baru. Kemarahan para petani pemilik lahan besar terhadap pemerintah *local* tumbuh menjadi semakin buruk diikuti dengan keputusan untuk mengurangi area lahan pertanian pangan sekunder.<sup>35</sup>

Di Sidoarjo, seperti penghasil gula lainnya di Jawa, padi sebagai bahan pangan sekunder dan tebu ditanam di lahan yang sama dalam 3 tahun putaran. Petani pertama menanam bahan pangan sekunder seperti jagung, singkong, kacang, kedelai dan nila di sawah mereka dan di awal desember menanam padi di lahan yang sama sebelum ditanami tebu pada mei-juni tahun selanjtnya. Diantara musim kemarau, jagung dan kedelai adalah yang paling penting dan tumbuh bersih. Hanya sediki sepertiga dari seluruh sawah di kabupaten ditanami dengan tanaman sekunder ini dalam satu waktu, dan kabupaten hanya mempunya sepertiga dari semua lahan yang bisa ditanami tanaman sekunder di Surabaya. Di Bulang, Porong dan Sidoarjo, petani menanam tanaman sekunder secara

---

<sup>35</sup> Widodo, *Sidoarjo Tempo Doeloe*, 125.

intensif, memenuhi lebih dari 35 % semua sawah. Petani di Bulang menanam jagung dan kedelai lebih intensif daripada kabupaten lainnya. Penanaman tanaman sekunder telah meningkat tajam di Surabaya meski menemui kegagalan juga. Di Surabaya ada pertumbuhan pasar dan dikota lain juga, sebagian besar orang-orang yang bekerja di pabrik gula di daerah desa bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Jaringan jalan-jalan dan jalan air menghubungkan pertanian di daerah pedalaman dengan kota yang memudahkan petani di Sidoarjo untuk mengirim beras dan bahan okok lainnya ke pasar *local*.<sup>36</sup>

Penanaman padi dan bahan pokok sekunder dalam skala besar di lahan yang berspesifik untuk penanaman tebu selalu menjadi sumber gesekan antara petani dan pabrik gula. Permainan halus dari perputaran pertanian yang kompleks di area pertanaman tebu membutuhkan pemanenan padi yang cepat dan bahan pokok sekunder yang tumbuh di sawah dipisah untuk penanaman tebu di musim hujan selanjutnya. Tetapi pengusaha pabrik gula menggantungkan operasi pabrik untuk mengizinkan petani menanam bahan pokok sekunder di musim kemarau. Jumlah air yang tersedia di musim kemarau tidak bisa memenuhi kebutuhan keduanya dan terkecual para petani yang harus mengorbankan kepentingannya.

Sementara itu penanaman kopi masih terus dipaksakan oleh pemerintah Hindia Belanda atau Indonesia, karena keuntungan yang diperoleh besar sekali

---

<sup>36</sup> Fernando, "The Trumpet Shall Sound for Rich Peasants: Kasan Mukmin's Uprising in Gedangan, East Java, 1904", *Journal of Southeast Asian Studies*, 247.

dari kopi itu. Akan tetapi anggota-anggota DPR Belandamendesak akan penghapusan seluruh *cultuurstelsel* itu, sehingga pada tahun 1892 Majelis Rendah memajukan *mosi*, yang mengusulkan penghapusan kerja paksa dalam hal penanaman kopi. Akan tetapi hal itu baru berlaku pada tahun 1915, setelah diterima undang-undang penghapusan penanaman kopi. Pada tanggal 1 Januari 1917 barulah *cultuurstelsel* benar-benar sudah tidak diberlakukan lagi.

Pada tahun 1889-1898, sebuah perusahaan trem uap O. J. S (*Oost Java Stoomtram Maatchappij*) membangun jalur trem Krian-Sepanjang-Wonokromo hingga ke ujung Surabaya. Ketika membangun jalur-jalur rel di Krian, pihak perusahaan membongkar paksa makam-makam leluhur yang sangat dihormati penduduk.<sup>37</sup>

Penyediaan air bersih di Sidoarjo sudah dimulai pada masa Hindia Belanda pada tahun 1900an. Pada tanggal 6 Juni 1900, dalam Staatsblad No. 225 tahun 1900, pemerintah Belanda memutuskan untuk membangun instalansi air minum di Karesidenan Surabaya. Sidoarjo saat itu masih dalam wilayah Keresidenan Surabaya. Peresmianya sendiri pada tanggal 8 Oktober 1903. Pada zaman sebelum adanya pipa paralon, Belanda membuat sebuah pipa yang terbuat dari logam atau *carbon steel* yang di mulut penduduk pribumi disebut *pipo londo*. Pada tahun 1890, seorang pengusaha Belanda bernama Birnie mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pengadaan air minum bersih dari Umbulan di Pasuruan ke Surabaya dengan menggunakan jaringan *pipo londo*.

---

<sup>37</sup> Widodo, *Sidoarjo Tempo Doeloe*, 198.



Jadi pipa dipasang menyambung membentuk suatu jaringan mulai dari Pasuruan, Bangil, Sidoarjo hingga Surabaya. Disamping itu juga sudah ada dua perusahaan Belanda yang mengajukan konsep sejenis, perbedaannya mereka mengambil sumber air dari Pandaan melalui Sidoarjo dan dialirkan ke Surabaya. Ketika jaringan pipa ini sampai di Sidoarjo, maka dibuatlah cabangnya ke rumah-rumah warga.

Awalnya jaringan pipa ini menguntungkan bagi persediaan air bersih untuk warga. Namun pada tahun 1903 muncullah rumor bahwa air yang diarahkan ke rumah-rumah di Sidoarjotercegar.<sup>38</sup> Pencemaran ini terdeteksi dari tercampurnya air jernih dengan air bewarna putih susu. Kepada pemerintah dilaporkan bahwa pencemaran itu sebenarnya telah terjadi di sumbernya, di Kasri. Pipa tersebut telah diisi dengan *Banyu Srani* (Air Nasrani).<sup>39</sup>

Bangunan rel kereta api yang melintang di lahan beberapa terendam air, di pertimbangkan sebagai aksi yang menggunakan bahan kimia untuk membersihkan air yang mengalir melalui sebuah kanal di area yang memiliki sumber air untuk diminum yang diartikan sebagai sebuah percobaan kristenisasi.

Banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat tersebut membuat Kyai Hasan Mukmin yang telah di dorong oleh gurunya untuk mendapatkan tempat yang lebih luas di dalam sejarah, mendeklarasikan diri sebagai Ratu Adil.

<sup>38</sup> Fernando, "The Trumpet Shall Sound for Rich Peasants: Kasan Mukmin's Uprising in Gedangan, East Java, 1904", *Journal of Southeast Asian Studies*, 246.

<sup>39</sup> Widodo, *Sidoarjo Tempo Doeloe*, 199.